



## Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional dalam Perang Sudan 2023: Tinjauan Umum Konflik dan Penegakan Hukum

Anisa Anjayani Triningsih<sup>1\*</sup>, Raveline Naftali Brigita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: [anisaanjayani1222@gmail.com](mailto:anisaanjayani1222@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: [qitagitkur@gmail.com](mailto:qitagitkur@gmail.com)

\*Correspondence Email: [anisaanjayani1222@gmail.com](mailto:anisaanjayani1222@gmail.com)

**Abstract.** In early 2023, Sudan faced significant turmoil primarily driven by a civil war involving prominent military factions. The conflict stemmed from a power struggle and ideological differences between General Abdel Fattah Al Burhan, who assumed leadership of the armed forces and presidency, and his deputy, General Mohamed Hamdan Dagalo, who also heads the Paramilitary Rapid Support Force (RSF). This research aims to analyze the Sudanese conflict's impact on the population and the role of international law in addressing violations during the crisis. The war has exacted a heavy toll on Sudanese civilians, resulting in substantial loss of life and exacerbating humanitarian crises across the country. International law emerges as a crucial avenue for holding accountable those responsible for violations, encompassing both military and civilian populations. Employing sociolegal juridical methods, this study examines existing data pertaining to the Sudanese conflict and scrutinizes how international organizations enforce legal standards within this context. By leveraging international legal frameworks, this research advocates for applying legal sanctions to address violations committed by the Sudanese government and associated military factions. This approach seeks to provide legal recourse and justice for affected civilians while highlighting the imperative of international law in fostering accountability and peace amid ongoing conflict.

**Keywords:** Civil War; International Law; International Organizations; Law Enforcement; Sudan.

**Abstrak.** Pada awal 2023, Sudan menghadapi gejolak yang signifikan yang terutama dipicu oleh perang saudara yang melibatkan faksi-faksi militer terkemuka. Konflik ini berakar dari perebutan kekuasaan dan perbedaan ideologi antara Jenderal Abdel Fattah Al Burhan, yang mengambil alih kepemimpinan angkatan bersenjata dan kepresidenan, dengan wakilnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga memimpin Pasukan Dukungan Cepat Paramiliter (RSF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik Sudan terhadap penduduk dan peran hukum internasional dalam menangani pelanggaran selama krisis. Perang ini telah menimbulkan korban besar bagi warga sipil Sudan, mengakibatkan hilangnya nyawa yang substansial dan memperburuk krisis kemanusiaan di seluruh negara. Hukum internasional muncul sebagai sarana penting untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran, mencakup baik populasi militer maupun sipil. Dengan menggunakan metode yuridis sosiolegal, penelitian ini mengkaji data yang ada terkait konflik Sudan dan meneliti bagaimana organisasi internasional menegakkan standar hukum dalam konteks ini. Dengan memanfaatkan kerangka hukum internasional, penelitian ini mengadvokasi penerapan sanksi hukum untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dan faksi militer terkait.

**Kata kunci:** Hukum Internasional; Organisasi Internasional; Penegakan Hukum; Perang Saudara; Sudan.

## **INTRODUCTION (LATAR BELAKANG)**

Perang saudara yang meletus di Sudan pada 2023 berakar dari perebutan kekuasaan setelah penggulingan diktator/presiden Sudan Omar al-Bashir, yang dipicu oleh tuntutan rakyat untuk pengunduran dirinya. Dalam kekosongan kekuasaan yang terjadi, militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Al Burhan, dan RSF Paramiliter di bawah Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo mengambil alih kendali, yang mendapat penolakan luas dari rakyat Sudan. Setelah tekanan yang cukup besar, pemerintahan transisi dibentuk untuk membuka jalan menuju pemilihan demokratis. Namun, pada 2021, militer secara sepihak merebut kekuasaan sekali lagi, yang memicu kerusuhan dan konflik baru. (Rosdiana and Nathania 2025).

Setelah kudeta yang berhasil, kekuasaan di Sudan dikonsolidasikan oleh Jenderal Abdel Fattah Al Burhan sebagai kepala angkatan bersenjata dan presiden, bersama Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), yang memimpin RSF. Ketegangan antara militer Sudan dan Paramiliter RSF meningkat karena agenda yang berbeda dan ambisi kekuasaan, yang mencapai puncaknya pada April 2023 ketika kekerasan meletus, merenggut nyawa ratusan warga sipil dan mengakibatkan korban jiwa dan kehancuran yang substansial. (Ilmu and Sui 2022).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada awal Mei, konflik telah merenggut lebih dari 600 nyawa dan meninggalkan lebih dari 5.000 orang terluka, terutama karena bentrokan antara militer Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF di bawah Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo. Dalam menghadapi krisis semacam itu, organisasi internasional memainkan peran penting dalam menegakkan dan melaksanakan hukum internasional. (Omar and Di 2021).

Hukum internasional telah berperan dalam menangani dan memitigasi konflik secara global, termasuk yang terjadi di Sudan. Ini berfungsi untuk menetapkan norma, memediasi perselisihan, dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran. Keterlibatan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika (AU), dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah sangat penting di Sudan, bekerja untuk memfasilitasi negosiasi perdamaian, menerapkan sanksi, dan menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia. (Hukum et al. 2025).

Mengingat sejarah konflik dan tantangan kemanusiaan Sudan, organisasi internasional terus memainkan peran vital dalam mempromosikan stabilitas, upaya pembangunan perdamaian, dan penegakan kerangka hukum internasional. Upaya kolektif mereka sangat penting dalam menangani dinamika konflik yang kompleks dan berkontribusi terhadap perdamaian yang langgeng di Sudan dan sekitarnya.

Konflik di Sudan telah menjadi sorotan internasional yang melibatkan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang mengkhawatirkan, ketidaksetaraan sosial, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi, yang jelas bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan secara khusus menjaga perdamaian dunia dan melindungi hak asasi manusia. Mempertimbangkan beberapa pernyataan di atas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas masalah Hukum Internasional dalam Perang Saudara di Sudan pada 2023 dengan meninjau dan menganalisis tinjauan konflik yang berdampak pada kehidupan rakyat Sudan dan peran hukum internasional dalam upaya penegakan hukum dalam konflik yang terjadi. (Khairunnisa 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi internasional dalam penegakan hukum internasional terkait konflik di Sudan, dengan fokus pada dampak sosial dan hukum dari campur tangan organisasi internasional dalam mengatasi konflik. Penelitian ini menganalisis peran organisasi internasional dalam penegakan hukum internasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan konflik di Sudan.

### RESEARCH METHOD (METODE PENELITIAN)

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-sosiolegal. Metode ini digunakan untuk menganalisis peran organisasi internasional dalam penegakan hukum internasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan konflik di Sudan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, analisis konflik, dan analisis organisasi internasional yang terlibat dalam upaya penegakan hukum di Sudan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji kerangka hukum internasional yang relevan, termasuk perjanjian internasional, resolusi PBB, dan yurisdiksi ICC. Sementara itu, pendekatan sosiolegal digunakan untuk memahami dampak sosial dari konflik terhadap masyarakat Sudan dan bagaimana implementasi hukum internasional mempengaruhi kondisi sosial di lapangan. (Gunawan et al. 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka terhadap dokumen-dokumen resmi organisasi internasional, laporan kemanusiaan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan dengan konflik Sudan 2023. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena konflik dan peran hukum internasional dalam penyelesaiannya.

Model penelitian menggambarkan hubungan antara:

**X<sub>1</sub> (Dampak Perang Saudara di Sudan)** memengaruhi **Y (Efektivitas Penegakan Hukum Internasional)**;

**X<sub>2</sub> (Organisasi Internasional)** sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah efektivitas penegakan hukum.

Model ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan normatif antarvariabel secara konseptual, bukan empiris, dalam konteks analisis hukum internasional.

### RESULT AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

#### 1. Dampak Perang Saudara di Sudan terhadap Masyarakat

Pada Sabtu, 15 April 2023, baku tembak intens terjadi di seluruh Sudan antara kelompok militer dan milisi. Insiden ini mengakibatkan 100 orang meninggal, dan 1.100 orang terluka. Kedua belah pihak memperebutkan target-target kunci di ibu kota, Khartoum, seperti istana kepresidenan dan bandara internasional. Sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi, telah ada diskusi bahwa anggota pasukan RSF akan digabungkan ke dalam militer. Kedua jenderal tentara juga memperebutkan posisi panglima tertinggi. Kelompok militer menyadari kebangkitan RSF dan khawatir bahwa Hemedti memiliki agenda politik sendiri. (Perang and Di 2024).

Perang Saudara Sudan yang terjadi pada 2023 berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat setempat. Konflik semacam itu cenderung menyebabkan gangguan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang besar. Dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### **a) Dampak Sosial**

Peningkatan tingkat kekerasan dan ketegangan sosial adalah fenomena yang mengacu pada situasi di mana terjadi peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan fisik, konflik, ketidakstabilan, atau perselisihan sosial dalam masyarakat atau wilayah tertentu. Dalam konteks sosial, kekerasan mengacu pada penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang melibatkan ancaman fisik untuk melukai, menyakiti, atau membunuh orang lain. Konflik bersenjata menyebabkan peningkatan tingkat kekerasan dan ketegangan antar kelompok di Sudan. Dampak peningkatan kekerasan dan ketegangan sosial di Sudan sangat merugikan Masyarakat. (Tanjung 2024).

Peningkatan kekerasan di Sudan menyebabkan cedera fisik, hilangnya nyawa, dan trauma bagi individu dan komunitas yang terlibat. Ini merugikan kesehatan fisik dan mental dan meningkatkan risiko kehidupan yang lebih buruk di masa depan. Dan pembangunan terhambat. Ketegangan sosial menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Fokus pemerintah bergeser dari program pembangunan ke upaya menjaga keamanan dan menyelesaikan konflik, sehingga menghambat kemajuan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. (Gunawan 2024).

Konflik dan ketegangan sosial memperdalam perpecahan antara kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat menjadi terpecah, persatuan dan solidaritas menurun, dan rasa kebersamaan berkurang. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk kerja sama dan pembangunan sosial. Dan kerusakan infrastruktur dan permukiman. Konflik bersenjata sering merusak infrastruktur seperti rumah, sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Ini berdampak pada orang-orang yang terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan. Kerusakan permukiman menyebabkan orang kehilangan rumah mereka dan dapat memaksa mereka menjadi pengungsi di dalam negara. (Rosdiana and Nathania 2025)

**b) Dampak Ekonomi**

Perang saudara yang terjadi mengganggu stabilitas ekonomi di Sudan. Investasi berkurang, bisnis terganggu, dan lapangan kerja berkurang karena orang enggan berinvestasi atau bekerja dalam lingkungan yang tidak stabil. Perang Saudara juga dapat mengganggu produksi pertanian dan akses ke pasar, yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan pangan di Sudan. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan kelaparan dan malnutrisi, terutama di antara anak-anak dan kelompok rentan lainnya. (Siburian and Indrawati 2024).

Konflik Perang Saudara di Sudan menghambat perdagangan dan distribusi pangan, mengganggu distribusi dan perdagangan pangan. Ini dapat mengganggu jalur pasokan pangan, menyebabkan kelangkaan pangan dan peningkatan harga pangan. Distribusi bantuan kemanusiaan juga dapat terhambat, membuat akses ke pangan lebih sulit bagi populasi yang terkena dampak konflik, terutama bagi pengungsi dan kelompok terisolasi yang menghadapi tantangan serius dalam memperoleh makanan yang cukup. Kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan. Penyakit menular juga dapat menyebar lebih mudah karena keterbatasan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Kelaparan dan malnutrisi dapat meningkat, terutama di antara anak-anak dan wanita hamil. (Economic and Consequences 2025).

**c) Dampak Kemanusiaan**

Perang saudara dapat memicu krisis kemanusiaan yang meluas, mulai dari pembunuhan hingga kekerasan. Sebagai akibat dari perang saudara Sudan, jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan layanan kesehatan. Krisis kemanusiaan yang dihasilkan dari perang di Sudan menghadirkan tantangan serius bagi kehidupan dan kesejahteraan penduduk di negara itu. (Omar and Di 2021).

Konflik di Sudan telah menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi atau pengungsi internal. Mereka melarikan diri dari kekerasan, pembunuhan, dan pemusnahan dalam konflik. Kondisi pengungsian yang sulit dan kurangnya akses ke sumber daya dasar, seperti air bersih, makanan, perumahan, dan layanan kesehatan, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mengerikan. Perang juga telah merusak infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan fasilitas medis. (Hukum et al. 2025).

Konflik sering memicu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual, eksekusi sewenang-wenang, dan pengusiran paksa. Kelompok rentan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua, sangat terpengaruh. Dalam konteks perang saudara, pelanggaran hak asasi manusia yang serius sering terjadi, termasuk kekerasan seksual dan pembunuhan. Kekerasan

seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merusak pada korban. (Ahmed et al. 2026).

Kekerasan seksual yang terjadi selama perang dapat memicu siklus kekerasan yang berkelanjutan. Ketidakadilan dalam membawa pelaku ke pengadilan dan kegagalan untuk memberikan keadilan bagi korban dapat memperkuat budaya kekerasan, mendorong lebih banyak kekerasan seksual di masa depan. Pembunuhan skala besar atau terorganisir selama perang dapat menyebabkan hilangnya nyawa yang signifikan. Pembunuhan dapat menciptakan ketakutan dan trauma yang meluas di antara komunitas yang terkena dampak. Individu yang bertahan hidup atau menyaksikan pembunuhan sering mengalami dampak psikologis jangka panjang, seperti gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi. (Mustasilta 2025).

Ada banyak kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum selesai di negara Sudan. Beberapa masalah yang tidak luput di wilayah Sudan adalah kejahatan dan penyiksaan yang mengerikan terhadap perempuan, krisis pangan bagi anak-anak, hilangnya kebebasan berekspresi dan berserikat, dan pembunuhan yang tidak manusiawi. Meskipun Sudan Selatan menjadi merdeka setelah memisahkan diri dari Republik Sudan pada 9 Juli 2011, kemerdekaan sejati tidak dapat dirasakan oleh rakyat Sudan Selatan, terutama perempuan, anak-anak, dan warga sipil. (Siburian and Indrawati 2024).

Konflik dimulai dengan pemecatan seluruh kabinet pemerintah. Konflik terjadi antara dua kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut, Dinka dan Nuer. Sebagai akibat dari pecahnya konflik, kelompok-kelompok bersenjata menargetkan serangan mereka pada warga sipil dengan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual, menghancurkan properti milik penduduk, penjarahan, dan merekrut anak-anak sebagai pasukan dalam kelompok mereka. Anak-anak yang direkrut ke dalam pasukan ini mengalami penyiksaan. Anak di bawah umur dipaksa untuk menyaksikan pemerkosaan suku mereka sendiri dan penyiksaan yang tidak manusiawi seperti pencongkelan mata, penyayatan, pemenggalan kepala, dan yang terburuk, dibakar dan dimutilasi hidup-hidup. (Mada, Agama, and Dliya 2024).

**Tabel 1. Dampak Sosial, Ekonomi dan Kemanusiaan**

Kategori Dampak	penjelasan
Sosial	Meningkatnya kekerasan fisik dan konflik antar kelompok yang menyebabkan cedera, kematian, dan trauma psikologis. Fokus pemerintah bergeser ke keamanan sehingga menghambat kemajuan pendidikan dan kesejahteraan. Konflik memperdalam perpecahan etnis dan menurunkan persatuan serta solidaritas. Rusaknya fasilitas

	umum menyebabkan pengungsian paksa dan meningkatnya pengungsi internal.
Ekonomi	Investasi dan lapangan kerja berkurang akibat lingkungan yang tidak stabil. Gangguan produksi pertanian menyebabkan kelaparan dan malnutrisi pada kelompok rentan. Jalur pasokan pangan terputus dan harga meningkat, bantuan kemanusiaan sulit disalurkan. Penyakit menular menyebar dan akses terhadap air bersih serta sanitasi terbatas.
Kemanusiaan	Jutaan orang membutuhkan bantuan makanan, air bersih, perlindungan, dan layanan kesehatan. Jutaan pengungsi menghadapi kondisi sulit dan kurangnya akses sumber daya dasar. Kekerasan seksual dan pengusiran paksa menimbulkan trauma jangka panjang, terutama pada perempuan dan anak-anak. Perekrutan anak sebagai tentara dan penyiksaan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Impunitas pelaku memperkuat budaya kekerasan yang berkelanjutan.

*Sumber: Analisis penulis, diolah dari (Gunawan 2024), (Siburian and Indrawati 2024), dan (Hukum et al. 2025).*

## **2. Peran Hukum Internasional dalam Perang Saudara di Sudan**

Konflik di Sudan memiliki sejarah panjang perang saudara Sudan dimulai pada 1983 setelah pemerintah Sudan yang didominasi Arab memperkenalkan undang-undang yang memberlakukan hukum Syariah secara nasional. Konflik Sudan juga meluas ke wilayah Darfur barat dari 2003 hingga 2020, ketika kelompok-kelompok pemberontak di wilayah tersebut memberontak terhadap pemerintah pusat. Konflik di Darfur telah menjadi salah satu konflik terbesar dan paling berkepanjangan di dunia, dengan dampak yang sangat serius pada penduduk sipil, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang dilaporkan. (Anon 2025).

Selain konflik di selatan dan Darfur, Sudan juga menghadapi konflik lain di wilayah seperti Kordofan Selatan, Wilayah Biru, dan Pegunungan Nuba. Ada juga konflik antara Sudan dan Sudan Selatan yang terjadi sehubungan dengan pemisahan Sudan Selatan dari Sudan pada 2011. Konflik di daerah-daerah ini sering terkait dengan masalah etnis, agama, dan politik yang kompleks. Pada awal 2023, perang saudara lainnya disebabkan oleh ketidaksepakatan dan perebutan kekuasaan antara dua kelompok militer yang berkuasa di Sudan. (Mada et al. 2024).

Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa



berfungsi sebagai forum bagi negara-negara untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan mengadopsi perjanjian hukum internasional. Selain itu, organisasi internasional juga dapat memiliki mandat khusus untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum internasional. (Kiros n.d.)

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memainkan peran penting dalam menangani konflik di Sudan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan misi penjaga perdamaian di Sudan, yang dikenal sebagai Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan (UNMIS), pada 2005. UNMIS bertujuan untuk mendukung implementasi Perjanjian Perdamaian Komprehensif antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang mengakhiri lebih dari dua dekade perang saudara antara Sudan Utara dan Selatan. Misi ini membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi, pemulihan pasca-konflik dan memantau gencatan senjata. (Gunawan 2024).

Dalam menghadapi situasi Darfur yang bergejolak, PBB dan AU bekerja sama untuk mendirikan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa-Uni Afrika di Darfur (UNAMID) pada 2007. UNAMID adalah misi bersama yang bertujuan untuk melindungi warga sipil, memfasilitasi dialog politik, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak konflik di Darfur. UNAMID terdiri dari personel militer dan sipil dari negara-negara anggota PBB dan AU dan beroperasi di bawah mandat kedua organisasi. Keberadaan UNAMID telah memberikan perlindungan kepada warga sipil yang rentan dan membantu mengurangi kekerasan di wilayah tersebut. (Anon 2025).

ICC juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum internasional terkait konflik di Sudan. ICC adalah pengadilan internasional yang bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC telah mengeluarkan sejumlah surat perintah penangkapan terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan serius di Sudan, termasuk mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Meskipun proses pengadilan ICC terhadap pelaku kejahatan ini masih berlangsung, langkah ini telah menandakan bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia tidak akan luput dari tanggung jawab hukum. (Omar and Di 2021).

Namun, peran organisasi internasional dalam menegakkan hukum internasional terkait konflik di Sudan juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepatuhan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terhadap sanksi dan tuntutan hukum yang diberlakukan oleh organisasi internasional. Kadang-kadang, pelaku kejahatan masih dapat menghindari akuntabilitas atau mendapat perlindungan dari negara-negara yang tidak mengakui kekuasaan ICC. (Wilayah et al. 2025).

Kompleksitas dan eskalasi konflik di Sudan juga merupakan tantangan bagi penegakan hukum internasional. Organisasi internasional perlu menangani situasi yang kompleks dan sering terlibat dalam negosiasi yang panjang dan sulit dengan



pihak-pihak yang berkonflik. Koordinasi antara organisasi internasional juga merupakan tantangan karena perbedaan prioritas dan pendekatan di antara mereka. (Hukum et al. 2025)

Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama dan koordinasi yang lebih erat antara organisasi internasional, negara-negara anggota, dan pihak-pihak yang berkonflik sangat penting. Upaya bersama diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Sudan tidak terjadi lagi, pelaku kejahatan diadili secara adil, dan perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai. (Ahmed et al. 2025).

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia karena perang saudara di Sudan. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencoba menghentikan perang saudara, antara lain: Mediasi dan Diplomasi. PBB dapat mengirim misi mediasi atau negosiasi untuk berbicara dengan pihak-pihak yang berkonflik. Mediator PBB dapat mencoba menjangkau semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan menghentikan pertumpahan darah. (Dahab et al. n.d. 2025).

Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan memberlakukan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar perdamaian. Resolusi semacam itu dapat memberikan tekanan politik dan ekonomi pada pihak-pihak yang terlibat dalam perang saudara. Dan operasi Penjaga Perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk memantau gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan memfasilitasi proses perdamaian. Pasukan ini beroperasi di daerah konflik dengan mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk meminimalkan eskalasi kekerasan. (Gabriel 2025).

## **CONCLUSION**

Krisis kemanusiaan yang dihasilkan dari perang saudara untuk kekuasaan di Sudan pada 2023 telah berdampak luas dan kompleks pada kehidupan masyarakat. Konflik bersenjata di negara ini telah mengubah lanskap sosial-ekonomi dan menyebabkan penderitaan yang tak terucapkan bagi rakyat Sudan. Jutaan orang telah terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk melarikan diri dari kekerasan dan ancaman terhadap kehidupan mereka, meningkatkan risiko penyakit menular, malnutrisi, dan kekerasan.

Krisis kemanusiaan ini juga ditandai oleh masalah ketahanan pangan yang parah. Konflik mengganggu produksi pangan, distribusi, dan akses ke sumber daya pertanian. Akibatnya, kelaparan dan malnutrisi melanda anak-anak di Sudan terutama. Akses ke layanan kesehatan terbatas, dan kurangnya perawatan medis yang memadai meningkatkan risiko kematian akibat cedera serius, penyakit menular, dan kondisi medis yang dapat dicegah. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama konflik, termasuk kekerasan seksual. Dampak signifikan dari konflik adalah gangguan terhadap sistem pendidikan.

Peran organisasi internasional dalam penegakan hukum internasional terkait konflik di Sudan memiliki dampak yang signifikan. Melalui misi perdamaian, pemantauan, dan pengadilan internasional, organisasi internasional seperti PBB dan ICC telah berperan dalam melindungi warga sipil, memfasilitasi rekonsiliasi, dan memastikan akuntabilitas hukum bagi pelaku kejahatan. PBB, melalui badan atau otoritasnya, harus segera memberikan sanksi tegas kepada Sudan dalam bentuk sanksi militer atau sanksi non-militer, meskipun Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan kecuali untuk tindakan penegakan hukum oleh dewan keamanan PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat membuat seruan kepada negara-negara lain untuk mendukung penghentian perang saudara di Sudan. Negara-negara lain harus terlibat secara aktif dalam upaya untuk mewujudkan tatanan dunia. Negara-negara lain juga diharapkan dapat mendukung upaya perdamaian di Sudan dengan melakukan protes diplomatik atau tindakan seperti memutuskan hubungan diplomatik dan menarik program bantuan sukarela kepada pemerintah Sudan jika mereka tidak menghentikan perang saudara di negara mereka.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional dalam Perang Sudan 2023, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian konflik.

1. Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antara organisasi internasional seperti PBB, Uni Afrika, dan ICC dalam menangani konflik di Sudan. Koordinasi yang lebih efektif akan meminimalkan tumpang tindih mandat dan memaksimalkan dampak intervensi kemanusiaan.
2. PBB perlu segera menerapkan sanksi yang lebih tegas dan komprehensif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, baik melalui sanksi ekonomi maupun embargo militer, untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.
3. Komunitas internasional harus meningkatkan dukungan terhadap proses perdamaian melalui diplomasi aktif dan mediasi berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Negara-negara anggota PBB diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam misi penjaga perdamaian dan bantuan kemanusiaan untuk melindungi warga sipil yang rentan. Selain itu.
4. Perlu ada mekanisme pemantauan yang lebih ketat terhadap implementasi kesepakatan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian untuk memastikan komitmen semua pihak yang berkonflik. ICC juga harus diperkuat

kewenangannya dalam mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan dukungan penuh dari negara-negara anggota untuk memastikan tidak ada impunitas bagi para pelanggar HAM berat di Sudan.

## REFERENCES (DAFTAR REFERENSI)

- Ahmed, Mosab, Mariam Raouf, Khalid Siddig, and Mosab Ahmed. 2026. "What Are the Economic and Poverty Implications for Sudan If the Conflict Continues Through 2025 ? What Are the Economic and Poverty Implications for Sudan If the Conflict Continues Through 2025 ?" *The Journal of Development Studies* 62(1):106–27. doi: 10.1080/00220388.2025.2510642.
- Ahmed, Yasar, Nabeeha Karadawi, Mutasim Abubaker, and Awad Mustafa. 2025. "Impact of Armed Conflict on Cancer Care in Sudan : Challenges and Strategic Responses." 1–9. doi: 10.1200/GO-24-00568.
- Anon. 2025. "The Darfur Conflict : Failure and Violation of International Law." 12(4):267–76.
- Dahab, Maysoon, Rahaf Abukoura, Francesco Checchi, Aljaile Ahmed, Omama Abdalla, Mona Ibrahim, Nada Abdelmagid, and Israa Zain Alabden. n.d 2024. "Articles War-Time Mortality in Sudan : A Multiple Systems Estimation Analysis." *The Lancet Global Health* 13(9):e1583–90. doi: 10.1016/S2214-109X(25)00228-1.
- Economic, The, and Social Consequences. 2025. "ECONOMIC." (May).
- Gabriel, Mad. 2025. "The Conflict in Sudan : An Overview." 9(2):260–67.
- Gunawan, Yordan. 2024. "Civil War in South Sudan : Conflict Resolution through Mediation by the African Union." 14(1):96–116. doi: 10.23917/jurisprudence.v14i1.4224.
- Gunawan, Yordan, Muh Raqi, Pratama Putra, Muh Faqih, Al Khairi, and Mohammad Hazyar Arumbinang. 2023. "International Law in the Sudanese War 2023 : An Overview of the Conflict and Law Enforcement."
- Hukum, Cendekia Jurnal, Anas Putra Ichsan, I. Komang Agus, Ari Setiawan, Sugiandy M. Amin, and Agus Kurniawan. 2025. "Tantangan Dan Peluang Peradilan Pidana Internasional Di Era Globalisasi." 3(1):965–76.
- Ilmu, Jurnal, and Hukum Sui. 2022. "No Title." 2(3):17–24.
- Khairunnisa, Brilliant Windy. 2023. "Resolusi Konflik Di Sudan Dan Dampaknya Dalam Skala Internasional." 04.
- Kiros, Kidane. n.d 2024. "THE ONGOING WAR IN SUDAN AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SECURITY AND STABILITY OF THE HORN OF AFRICA AND BEYOND."
- Mada, Al, Jurnal Agama, and Ahmad Dliya. 2024. "Penerapan Federalisme Atas Konflik Sudan." 7(2):420–31.

- Mustasilta, Katariina. 2025. "The Era of a Multipolar." (September).
- Omar, Oleh, and Hassan Al-bashir Di. 2021. "YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ( ICC ) DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT." 7(2):59–67.
- Perang, Konflik, and Saudara Di. 2024. "No Title." 2:1–6.
- Ra, Firda Rosyana, and Windy Dermawan. n.d. "Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik Di Sudan Selatan." 3(1):53–74.
- Rosdiana, Hesti, and Vania Zahra Nathania. 2025. "Stigma : Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora Dinamika Perundingan Damai : Efektivitas Mediasi Internasional Dalam Konflik Sudan Selatan Pendahuluan Kajian Pustaka." 4(1):8–14.
- Siburian, Nathanael, and Indrawati Indrawati. 2024. "Analisis Keterlibatan Uni Emirat Arab Dalam Perang Saudara Sudan Tahun 2023 ( Analysis of the United Arab Emirates Involvement in the Sudanese Civil War in 2023 )." 4(2):85–96.
- Tanjung, Ahmad Fuadi. 2024. "Analisis Dampak Konflik Sudan Terhadap Perekonomian Dan Mahasiswa Indonesia Yang Beasiswa Di Sudan." 4:3091–3101.
- Wilayah, Keamanan, Perbatasan Chad, Andi Syakirah Nariswari, and Imam Fadhil Nugraha. 2025. "Krisis Pengungsi Di Sudan Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas." (April 2023).